



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)

1500200 informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-20368/CT/KPP.1702/2026**

Tanggal : 29 Januari 2026

NPWP : 5171025901030001

Nama Wajib Pajak : NI PUTU TISNA DEWI
KUSUMANTARI

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Juni - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT : 29 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

NOMOR : 02/1828803

Pembetulan Ke Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 5171025901030001
A.2 NIP/ NRP : 200301192025062002
A.3 NAMA : NI PUTU TISNA DEWI KUSUMANTARI, S.H.
A.4 PANGKAT/ GOL : III/a / Penata Muda
A.5 NAMA JABATAN : Pelaksana
A.6 JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI PEREMPUAN
A.7 NIK : 5171025901030001
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
TK / 0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENGHASILAN BRUTO			
1.		GAJI POKOK / PENSIUN	15.599.920
2.		TUNJANGAN ISTRI	0
3.		TUNJANGAN ANAK	0
4.		TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.		TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
6.		TUNJANGAN BERAS	0
7.		TUNJANGAN LAIN-LAIN	506.940
8.		PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	1.295.329
9.		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	15.603.200
PENGURANG			
10.		BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	1.650.269
11.		IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	740.993
12.		ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.		JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	2.391.262
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.		JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	30.614.127
15.		PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.		JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	30.614.127
17.		PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
18.		PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	134.696.000
19.		PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.		PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.		PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.		PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	0
23.		PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	0
	23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.		PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
	24a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001035195025000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 663157
D.4 Tanggal : 3 1 dt 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN : HARMINI
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah